

Strategi Pemilihan Lahan Parkir Kantor UPT. Ciputat Menggunakan *Factor Rating Methode*

Nur Hadi Wijaya¹, Irpan Alwi Anwari²

¹Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Kampus Dramaga Bogor 16680

²Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

ABSTRACT

Objective: The factors that influence are social and environmental, economic, political and cultural factors which consist of absolute factors and supporting factors. The absolute factors are Land Status (Free of Disputes and Wants to Sell), Conformity of the Spatial Planning Regulations (RTRW) and the lowest Risk Level in anticipating Natural Disasters. Other supporting factors are the address of the location, land area, price range, crossing the road, the availability of road access and transportation, close to government offices, crowd centers, other supporting infrastructure such as electricity, gas, water and other regional development potential.

Methodology: The data processing method used is the center-gravity method and factor rating method (Factor rating method).

Results: Based on the survey results show that from the results of data collection from 3 alternative additions / expansions of Ciputat UPT parking lots that meet the requirements are Location / Land / Empty Land located on the Right Side (South UPT Ciputat Office Building) on Jl. Raya RE Martadinata 12 with the coordinates S 06o19'49.58 'E 106o44'53.32" is feasible to be developed in the UPT Ciputat parking lot.

Practical Implication: -

Paper Type: Research Paper

Keywords: Parking area..

ABSTRAK

Objektif: Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor sosial dan lingkungan, ekonomi, politik dan budaya yang terdiri dari faktor mutlak dan faktor pendukung. Adapun faktor mutlak adalah Status Lahan (Bebas dari Sengketa dan Pemilik Mau Menjual), Kesesuaian peraturan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) dan Tingkat Resiko terendah dalam mengantisipasi Bencana Alam. Faktor pendukung lain adalah alamat lokasi, luas lahan, kisaran harga, dilalui jalan raya, ketersediaan akses jalan dan transportasi, dekat dengan kantor pemerintahan, pusat keramaian, infrastruktur pendukung lainnya seperti listrik, gas, air dan potensi pengembangan wilayah lainnya.

Metodologi: Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode pusat-gravitasi dan metode pemeringkatan faktor (Factor rating methode).

Hasil: Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa dari hasil pendataan dari 3 alternatif penambahan/perluasan lahan parkir UPT Ciputat yang memenuhi persyaratan adalah Lokasi/Lahan/Kebon Kosong yang terletak di Samping Kanan (Selatan Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata 12 dengan koordinat S 06o19'49.58' E 106o44'53.32" layak untuk di jadikan pengembangan lahan parkir UPT Ciputat.

Implikasi Praktis: -

Jenis Naskah: Makalah Penelitian

Kata Kunci: Lahan parkir.

*Corresponding author

Alamat e-mail: nur.hadi.wijaya@gmail.com or nurhadi76@apps.ipb.ac.id

PENDAHULUAN

Setiap pelayanan publik yang memberikan jasa layanan maka perlu dilengkapi oleh beberapa fasilitas-fasilitas antara lain adalah tempat parkir. Penyelenggaraan Tempat Parkir merupakan kewenangan Daerah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah, yaitu:

1. Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir, dapat bekerja sama dengan perorangan atau badan
2. Penyelenggaraan Tempat Parkir dapat diselenggarakan oleh orang atau badan.
3. Untuk menyelenggarakan Tempat Parkir, perorangan atau badan terlebih dahulu mendapat ijin dari Kepala Daerah.
4. Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan tempat parkir, perorangan atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan a) Ijin Mendirikan Bangunan, b) Rekomendasi dari DLLAJ, c) Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Pemberian ijin penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Penentuan lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah.
7. Penentuan lokasi tempat parkir harus memperhatikan: a) RUTRD, b) Keselamatan dan kelancaran lalu lintas, c) Kelestarian lingkungan, d) Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Bentuk, ukuran dan penataan parkir pemasangan rambu dan marka parkir ditetapkan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kantor UPT yang didalamnya terdapat pelayanan Kantor Bersama Samsat yang sampai sekarang masih tetap operasional dengan baik merupakan bukti bisa terselenggaranya pelayanan publik oleh beberapa instansi pemerintah dengan kewenangan yang berbeda, namun tetap bisa bersama-sama bekerja dengan semangat memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya. Dasar hukum Samsat adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : INS/03/M/X/1999, No. : 29 Tahun 1999, Nomor : 6/IMK.014/1999, tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Secara rinci hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Polri, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. AK Jasa Raharja (Persero) dengan memperhatikan faktor keamanan dalam setiap proses pendaftaran kendaraan bermotor.

Dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dalam kaitan program pelayanan prima, BAPENDA Provinsi Banten melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan Samsat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetapan Samsat Pembantu Ciputat menjadi UPT Samsat Ciputat Definitif (mandiri) yang mencakup 4 Kecamatan (Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan Pondok Aren) di Lingkungan wilayah Kota Tangerang Selatan. Penyelenggaraan Kantor Bersama Samsat Ciputat untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (roda dua maupun roda empat atau lebih), dimaksudkan agar mempermudah dan mempersingkat waktu pembayaran Pajak Tahunan, BBNKB dan pengesahan STNK karena mengingat saat ini kapasitas parkir pelayanan pajak oleh UPT Ciputat masih punya pribadi.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan di Provinsi Banten

Tahun	2015	2014	2013
Total Kendaraan (unit)	4.899.184	4.476.009	4.052.834
Pertumbuhan Kendaraan Baru (unit)	423.175	423.175	270.555
Pertumbuhan Kendaraan (%)	8,64%	9,45%	6,68 %

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2015

Laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Banten mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Banten, jumlah kendaraan bermotor naik pada kisaran 8-13 persen. Sedangkan pada tahun 2015 pertumbuhan kendaraan bermotor di Banten naik hingga mencapai 8,64 persen. Peningkatan jumlah populasi kendaraan baru di Provinsi Banten berdampak terhadap peningkatan pendapatan Provinsi Banten dari sektor pajak kendaraan bermotor, pada Tahun 2014 saja tercatat jumlah kendaraan bermotor objek pajak di Provinsi Banten sebanyak 4.063.650 unit dan meningkat hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir.

Berdasarkan data yang diperoleh seperti tercantum pada Tabel 2, jumlah kendaraan hingga Desember 2014 mencapai 4.476.009, atau bertambah 423.175 unit kendaraan dari tahun 2013 yaitu sebanyak 4.052.834 unit. Pada 2015, proyeksi potensi kendaraan bertambah menjadi 4.899.184 unit. BAPENDA Provinsi Banten mengungkapkan, pada 2014 jumlah kendaraan didominasi kendaraan roda dua mencapai 3.792.900 unit, terdiri atas 17.498 kendaraan dinas dan bukan umum (pribadi) sebanyak 3.775.402 unit. Sedangkan, jumlah kendaraan roda empat sebanyak 683.109 unit terdiri atas kendaraan dinas 9.076 unit, kendaraan umum 56.479 unit, dan bukan umum 617.554 unit.

Setiap tahunnya jumlah kendaraan meningkat. Terutama kendaraan roda dua yang paling banyak mencapai jutaan. Jumlah ini berdasarkan bea balik nama kendaraan baru (BBNKB 1). Pertumbuhan kendaraan roda empat didominasi oleh minibus dan sejenisnya yaitu sebanyak 425.387 unit dan kebanyakan penambahan kendaraan dari kendaraan bukan umum atau kendaraan pribadi. Proyeksi potensi peningkatan persentase di 2015 juga sumbangsih dari kendaraan pribadi.

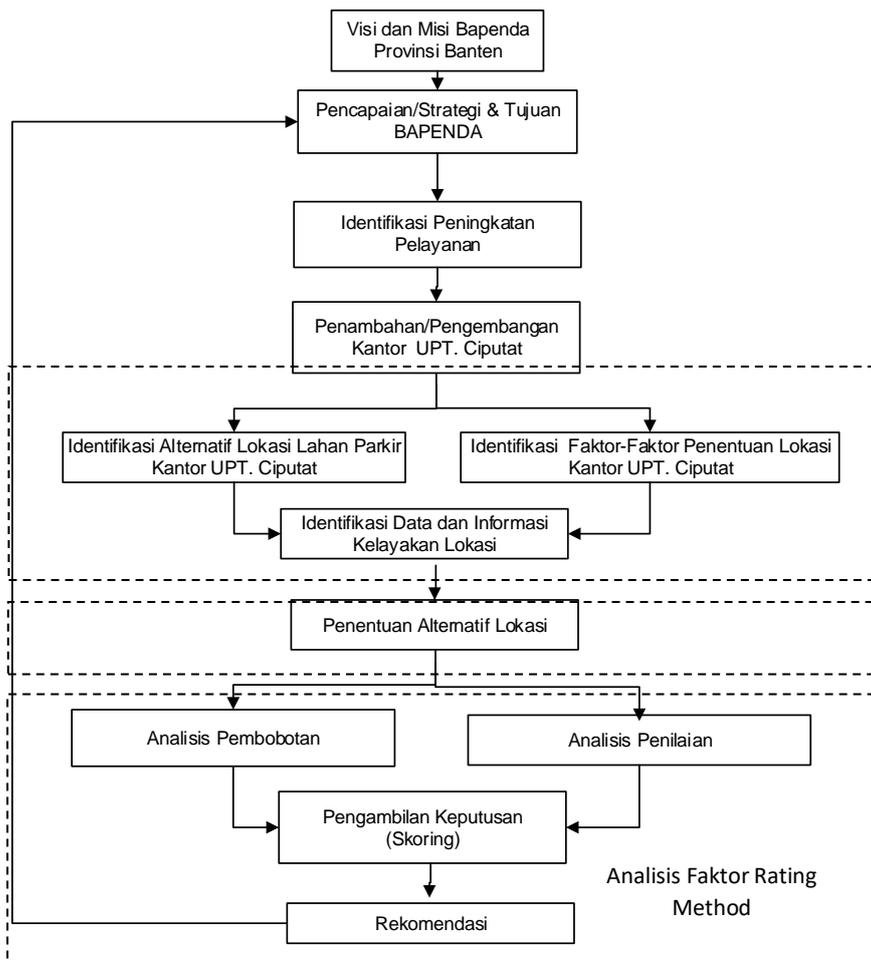
Peningkatan jumlah populasi kendaraan baru di Provinsi Banten berdampak terhadap peningkatan pendapatan Provinsi Banten dari sektor pajak kendaraan bermotor, pada Tahun 2014 saja tercatat jumlah kendaraan bermotor objek pajak di Provinsi Banten sebanyak 4.063.650 unit dan meningkat hampir 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir.

Sebagai upaya untuk membantu pelayanan pembayaran dan pengurusan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat di Provinsi Banten, pada Tahun 2012 Samsat Pembantu Ciputat ditetapkan oleh Pemprov. Banten sebagai UPT Samsat Ciputat. Konsekuensi dari pembentukan UPT Samsat Ciputat tersebut adalah peningkatan tugas dan tanggung jawab UPT Samsat Ciputat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak yang semula hanya memberikan pelayanan pajak PKB, tetapi juga melayani pelayanan lainnya, seperti BBN I dan BBN II yang selama ini ditangani oleh UPT Samsat Ciputat. Semakin besarnya tugas pelayanan UPT Samsat Ciputat menuntut perlunya dukungan sarana dan prasarana mengingat saat ini UPT. Samsat Ciputat belum memiliki lahan parkir.

METODE PENELITIAN

Terdapat banyak faktor, baik yang kualitatif maupun kuantitatif yang dipertimbangkan dalam memilih sebuah lokasi. Beberapa faktor ini lebih penting dari faktor lainnya, sehingga organisasi dapat menggunakan bobot untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih objektif. Kegiatan ini dilakukan di wilayah pelayanan UPT. Ciputat Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan November 2017 sampai dengan Desember 2017.

Kajian ini dilakukan dengan melakukan indentifikasi tujuan pengembangan kantor UPT. Ciputat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan visi & misi BAPENDA Provinsi Banten agar lebih mendekati kepada pelayanan masyarakat. Penentuan lokasi pengembangan kantor UPT. Ciputat Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan non ekonomi, hal ini sangat terkait dengan potensi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Faktor ekonomi antara lain akses jalan, kemudahan/kedekatan penduduk, ketersediaan infrastruktur, nilai asset/harga tanah dan faktor non ekonomi antara lain politik, sosial dan budaya, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Data yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mengenai organisasi dan proses operasional, penduduk yang terkait dalam proses FS tersebut. Selain itu juga melakukan pengamatan langsung terhadap lternative penambahan/ perluasan lokasi kantor UPT, kegiatan operasional kantor, kegiatan pelayanan masyarakat serta melakukan pengukuran yang terkait dengan penentuan lokasi.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode pusat-gravitasi dan metode pemeringkatan faktor (Factor rating metode).

Factor rating method (Metode pemeringkatan faktor)

Sebenarnya ada banyak faktor, kualitatif maupun kuantitatif, yang harus dipertimbangkan dalam memilih suatu lokasi. Beberapa dari faktor-faktor ini lebih penting dari yang lain, sehingga manajer dapat menggunakan penimbangan agar proses keputusan

bisa lebih objektif. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup variasi faktor yang sangat luas, mulai dari pendidikan, rekreasi sampai keahlian tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor yaitu metode lokasi yang mengikutsertakan objektivitas ke dalam proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi. Metode ini sering digunakan karena mencakup beragam faktor, mulai dari pendidikan, rekreasi, hingga keterampilan tenaga kerja. Metode pemeringkatan faktor memiliki enam langkah berikut: 1) Membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut faktor penentu keberhasilan, 2) Memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan kepentingan relatif dalam tujuan organisasi, 3) Membuat sebuah skala untuk setiap faktor, 4) Meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor dengan menggunakan skala pada langkah 3, 5) Kalikan nilai dengan bobot setiap faktor dan jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi, 6) Membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal yang juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif.

Metode Pusat Gravitasi (Centre of Gravity method)

Metode pusat-gravitasi merupakan teknik matematika dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimisasi biaya distribusi. Dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi, metode ini memperhitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Karena volume kendaraan kontainer yang dipindahkan setiap bulannya mempengaruhi biaya, jarak bukan menjadi satu-satunya kriteria utama. Metode pusat gravitasi mengasumsikan bahwa biaya secara langsung bersifat proporsional dengan jarak dan banyaknya barang yang diangkut. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang membuat jarak tertimbang antara gudang dan outlet pengecernya menjadi minimal, jarak ini diberi bobot sesuai dengan banyaknya kontainer yang diangkut.

Pusat gravitasi ditentukan oleh :

$$- C_x = \frac{\sum D_{ix} W_i}{\sum W_i}$$

$$- C_y = \frac{\sum D_{iy} W_i}{\sum W_i}$$

Dimana :

- C_x = koordinat x dari pusat gravitasi

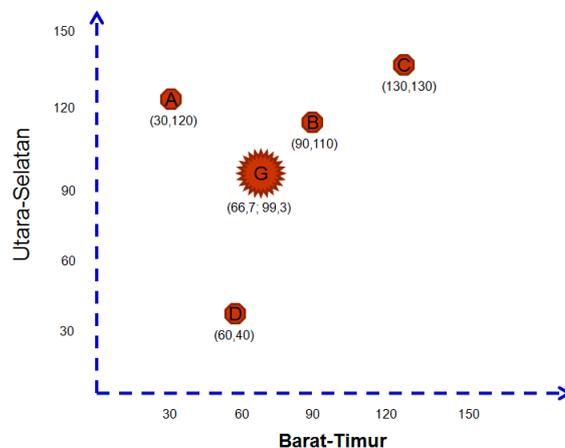
- C_y = koordinat y dari pusat gravitasi

- D_{ix} = koordinat x dari lokasi i

- D_{iy} = koordinat y dari lokasi i

- W_i = volume barang yang dipindahkan dari i

Contoh : Perusahaan akan merencanakan untuk membuka lokasi toko baru yang berada diantara keempat lokasi A, B, C dan D. Permintaan pada masing-masing toko yaitu: A=2.000, B=1.000, C=1.000 dan D=2.000. Pada koordinat manakah lokasi toko baru tersebut harus dibuka?



Gambar 2. Metode Pusat Gravitasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar fasilitas parkir adalah suatu pedoman untuk menentukan suatu ukuran petak parkir (stall) menurut berbagai bentuk penyediaannya. Penggunaan standar fasilitas parkir diperlukan karena tidak terdapatnya marka dari petak parkir pada daerah studi.

Tabel 2. Jenis dan Satuan Ruang Parkir

Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir (m ²)
a. Mobil penumpang untuk golongan I	2,30 x 5,00
b. Mobil penumpang untuk golongan II	2,50 x 5,00
c. Mobil penumpang untuk golongan III	3,00 x 5,00
d. Bus/truk	3,40 x 12,50
e. Sepeda Motor	0,75 x 2,00

Sumber : Dir. Jen. Perhub Darat (1996)

Berdasarkan kondisi yang ada maka dicari kembali alternative lokasi yang tidak terlalu jauh dari awal namun masih memiliki fasilitas pendukung operasional lainnya, dilalui jalan nasional (sesuai persyaratan dari Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang menyatakan kantor instansi pemerintah tidak jauh dari Jalan Nasional). Mengacu pada hasil survei, kriteria dan persyaratan lahan parkir harus lokasi yang berdekatan dengan lokasi yang ada pada saat ini, maka lokasi alternatif lahan parkir berada di depan, belakang, samping kiri dan sampan kanan gedung UPT. Ciputat saat ini. Kantor UPT Ciputat saat ini terletak pada koordinat Lintang Selatan (S 06o19'48.40") dan Bujur Timut (E 106o44'52.27").

Kantor UPT Ciputat dilalui langsung oleh Jalan Nasional RE. Martadinata, sehingga ditinjau dengan aspek keamanan alternatif lahan parkir yang berada diseborang kantor UPT. Tidak Layak dijadikan lahan parkir karena faktor resiko keamanan dalam menyebrang jalan untuk menuju ke Kantor UPT Ciputat. Untuk itu alaternatif calon lahan parkir mengerucut pada 3 lokasi yaitu Lokasi di Samping kanan, lokasi di samping Kiri Gedung dan Lokasi di belakang Gedung Kantor UPT Ciputat.

Berdasarkan hasil survey lapangan awal diketahui bahwa lokasi yang paling strategis untuk pengembangan lahan parkir di samsat Ciputat berada pada koordinat Daftar Alternatif Lokasi tersebut antara lain:

1. Lokasi pertama adalah Lahan/Kebon Kosong yang terletak di Samping Kanan (Selatan Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata 12 dengan koordinat S 06o19'49.58' E 106o44'53.32".
2. Lokasi kedua adalah Rumah dan Kebon yang terletak di Samping Kiri (Sebelah Utara Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata 08 dengan koordinat S 06o19'47.28' E 106o44'51.65".
3. Lokasi ketiga adalah Lahan/Tanah dan Kantor Perusahaan Perhubungan Darat (PPD) yang terletak di Belang (Sebelah Barat Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata dengan koordinat S 06o19'49.17' E 106o44'50.46".

Berikut rincian data dan informasi terkait masing-masing petak yang diperoleh dari pengamatan di lapangan:

1) Lokasi 1

Aspek Sosial Lingkungan: Luas lahan yang tersedia lebih dari 1.200m² dengan 1 sertifikat kepemilikan, pemilik (ahli waris mau menjual lahan dan bebas sengketa).

Aspek Ekonomi: Menawarkan dengan kisaran harga tanah/lahan (NJOP atau Harga Pasaran) Rp. 20. 000.000/m².

Aspek Politik: Tidak Ada

- 2) Lokasi 2
Aspek Sosial Lingkungan: Luas lahan yang tersedia lebih dari 1.800m² dengan 1 sertifikat kepemilikan, pemilik (ada ahli waris yang tidak mau menjual lahan dan masih sengketa).
Aspek Ekonomi: Menawarkan dengan kisaran harga tanah/lahan (NJOP atau Harga Pasaran) Rp. 20.000.000/m².
Aspek Politik: Tidak Ada
- 3) Lokasi 3
Aspek Sosial Lingkungan: Luas lahan yang tersedia lebih dari 1 ha dengan 1 sertifikat kepemilikan, pemilik perusahaan milik Negara BUMD (proses tidak diperjual belikan).
Aspek Ekonomi: perlu mengurus ke PPD Pusat di Jakarta untuk membeli atau tukar guling tanah tersebut.
Aspek Politik: Proses Birokrasi Aset Milik Negara

Berdasarkan analisis pendahuluan dengan melakukan pengumpulan data melalui pengumpulan data primer dan sekunder diketahui bahwa Ada 3 (tiga) faktor kritis terkait penentuan lokasi lahan parkir UPT. Ciputat Kota Tangerang Selatan, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor-Faktor Kritis Penentuan Lokasi

No	Faktor	Bobot	Keterangan
1	Sosial dan Lingkungan	20 %	Alamat lokasi (Topografi dan Lingkungan sekitarnya) Luas lahan yang tersedia (minimal 1000 m ²) Status Lahan (Bebas dari Sengketa dan Pemilih Mau Menjual) *)
2	Ekonomi	50%	Kisaran harga tanah/lahan (NJOP atau Harga Pasaran) Dilalui atau dekat jalan raya (Nasional/ Provinsi) Ketersediaan akses jalan-jalan alternatif Kemudahan Transportasi (Angkutan Umum) Bersebelahan dengan Kantor UPT
3	Politik	15%	Kedekatan dengan kantor UPT. Ciputat Potensi Pengembangan Wilayah (industri/ perkantoran/pemukiman) Kesesuaian peraturan Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) *)
4	Budaya	15%	Keamanan Lingkungan Sekitar Kenyamanan Lingkungan (dekat dengan tempat ibadah, rumah sakit dan sekolah) Tingkat Resiko terendah dalam mengantisipasi Force Majore*)

Keterangan : *) Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh calon lokasi

Berdasarkan Tabel 3 di atas diketahui bahwa faktor ekonomi memiliki pembobotan paling besar yaitu 50% dari nilai faktor lainnya, kemudian diikuti oleh faktor sosial dan lingkungan sebesar 20% dan faktor politik dan budaya masing-masing sebesar 15%. Indikator Status lahan bebas dari sengketa dan pemilik mau menjual lahan, serta luas lahan yang tersedia 1000m² menjadi faktor kunci paling penting dalam pemilihan calon lokasi sebagai calon prioritas pengembangan Lahan Parkir UPT. Ciputat Kota Tangerang Selatan. Untuk itu dicari alternatif calon lokasi yang terdekat Kantor UPT Ciputat, kami mendapatkan 3 alternatif calon lokasi yang dapat dijadikan penambahan/perluasan lahan parkir UPT Ciputat yang baru seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Kesesuaian Lahan Parkir untuk Kantor UPT. Ciputat

No	Lokasi	Keterangan
1	Sebelah Selatan Kantor UPT Ciputat	Sesuai, dan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan
2	Sebelah Utara Kantor UPT Ciputat	Kurang Sesuai, karena ahli waris belum sepakat dan tidak melampirkan dokumen yang diperlukan
3	Sebelah Belakang Kantor UPT Ciputat	Tidak Sesuai, karena tanah milik Negara perlu proses tukar asset yang prosesnya lama dan birokratis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa lokasi yang paling strategis untuk pengembangan lahan parkir di samsat Ciputat berada pada koordinat Daftar Alternatif Lokasi tersebut antara lain:

1. Lokasi pertama adalah Lahan/Kebon Kosong yang terletak di Samping Kanan (Selatan Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata 12 dengan koordinat S 06o19'49.58' E 106o44'53.32".
2. Lokasi kedua adalah Rumah dan Kebon yang terletak di Samping Kiri (Sebelah Utara Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata 08 dengan koordinat S 06o19'47.28' E 106o44'51.65".
3. Lokasi ketiga adalah Lahan/Tanah dan Kantor Perusahaan Perhubungan Darat (PPD) yang terletak di Belang (Sebelah Barat Gedung Kantor UPT Ciputat) di Jl. Raya RE Martadinata dengan koordinat S 06o19'49.17' E 106o44'50.46"

Dari Hasil pendataan dari 3 alternatif penambahan/pelebaran lahan parkir UPT Ciputat yang memenuhi persyaratan adalah :

1. Lokasi Pertama Layak untuk di jadikan pengembangan lahan parkir UPT Ciputat.
2. Lokasi Kedua Layak, namun tidak bisa di jadikan karena ada ahli waris yang belum sepakat.
3. Lokasi Ketiga tidak layak karena proses yang sangat panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, S. 2008. Manajemen Produksi dan Operasi, Edisi Keempat, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Azhari, Abdul K. (2006). Capacity Building Birokrasi Daerah yang Berjiwa Wirausaha. Aspirasi. XVI (1): 65-76
- BPS Provinsi Banten, 2013. Statistik Banten dalam Angka Tahun 2013. BPS Provinsi Banten. Serang
- BPS Provinsi Banten, 2014. Statistik Banten dalam Angka Tahun 2014. BPS Provinsi Banten. Serang
- BPS Provinsi Banten, 2015. Statistik Banten dalam Angka Tahun 2015. BPS Provinsi Banten. Serang
- Cahyono, B.T. 1996. Manajemen Operasi. IPWI. Jakarta.
- Direktorat Aparatur Negara Bappenas. (2004). Kajian Rencana Tindak Reformasi Birokrasi. Bappenas, Jakarta.
- FEM IPB, 2014. Modul Kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. FEM IPB: Bogor.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.

- Marimin dan N. Maghfiroh. 2011. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok.
- Pemprov Banten. 2012. Profil Potensi Investasi Kawasan Industri Provinsi Banten.
- Perda Kota Tangerang Selatan . 2014. Peraturan Daerah Tata Ruang Kota Tangerang Selatan No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2034.
- Purnomo, H. 2004. Perencanaan dan Perancangan Fasilitas. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pemindahan Ibu Kota Kota Tangerang Selatan dari Wilayah Kota Serang ke Wilayah Kecamatan Ciruas, Kota Tangerang Selatan , Provinsi Banten.
- Soeprapto, Riyadi. (2005). Pengembangan model Citizens Charter dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Indonesia. *Delegasi* (2): 123-150.
- Susanna, Elmia. 2014. Evaluasi Tata Letak (layout) dan Kapasitas Parkir Kendaraan Sepeda Motor di Univeristas Atmajaya Yogyakarta Kampus III Gedung Bonaventura. Atmajaya. Yogyakarta.
- Sutopo dan Suryanto Adi. 2009. Pelayanan Prima. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Syukri, Agus F. (2007). Tinjauan Sosio Teknologi Atas Penerapan Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jembrana Bali. *Jurnal Standarisasi* (9): 69-75
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22. 2009. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Vinni, Rauno. (2006). Total Quality Management and Paradigms of Public Administration. A Performing Public Sector: the Second Trans Atlantic Dialogue, Leuven, Belgium, June 1-3.